

ABSTRAK

Judul Penelitian ini : Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan.

Optimalisasi peran DPRD adalah hasil kerja yang dicapai oleh DPRD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Indikator pengukuran kinerja organisasi publik adalah efektivitas, responsivitas, akuntabilitas. Berdasarkan asumsi masyarakat, kinerja DPRD sebagai lembaga pembentukan Perda selama ini belum optimal, dalam menjalankan fungsinya DPRD mempunyai tugas prakarsa pembuatan Perda, pembahasan rancangan Perda, serta persetujuan hal ini belum dijalankan oleh DPRD pada umumnya, hal ini terbukti perda yang dihasilkan di kota Pekalongan dari tahun 2014-2016 lebih banyak perda usulan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode diskriptif yang bertujuan memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan empiris tidak hanya meneliti segi yuridis, tetapi juga secara riil dimasyarakat, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi dari nara sumber, sedangkan data skunder diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan-perturan perundangan lainnya yang relevan. Analisis data menggunakan teknik kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul dilakukan pengolahan, menganalisis, dan pengonstruksian secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda DPRD kota pekalongan dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan cenderung menurun, dilihat dari kehadiran dalam sidang rendah, dilihat dari tata kerja sering tidak mematuhi tata tertib, dilihat dari pengalaman banyak anggota yang baru, dilihat dari hubungan kemasyarakatan sering gagal mengolah informasi, dilihat dari relevansi pendidikannya kurang, sehingga pelaksanaan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Pekalongan belum optimal.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Pekalongan adalah berkomitmen yang tinggi akan pekerjaannya, komunikasi yang supel disemua lini, bintek profesional yang berkesinambungan, dan adanya sanksi yang tegas dari partai politik pengusungnya.

Kata kunci: Optimalisasi, DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah.

ABSTRACT

The Title of this Research: Optimizing DPRD Functions in the Formation of Local Regulations in Pekalongan City.

Optimizing the role of the Regional People's Legislative Assembly is the result of work achieved by the DPRD in accordance with its authority and responsibility or as an illustration of the magnitude of the results achieved from an activity whether viewed in quality or quantity in accordance with the objectives of the organization concerned. Performance measurement indicators of public organizations are effectiveness, responsiveness, accountability. Based on the news spread in the local parliament in carrying out its duties so far has not been optimal as an institution for the formation of local regulations, in the formulation of local regulations of parliament has the task of making the law, discussion of draft law, and approval of this has not been run by DPRD in general, the proof of perda produced in the city Pekalongan from 2014-2016 more local government proposals.

This research is a field research using descriptive method which aims to give systematic, factual and accurate description, by using sociological juridical approach that empirical approach not only examine juridical aspect, but also in real community, primary data source obtained from interview, and observation of the informants, while secondary data obtained from the 1945 Indonesian Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 12 of 2011, Law No. 17 of 2014, Law No. 23 of Know 2014 and other relevant regulatory legislation . Doc analysis using qualitative technique, where after all the data collected performed processing, analyzing, and constructing thoroughly.

The result of the research shows that based on the fact that there execution of the function of the formation of Perda DPRD Pekalongan city seen from the number of products produced tends to decrease, seen from the attendance in the lower court, seen from the working order often do not obey the order, seen from the experience of many new members, of community relations often fail to process information, seen from the relevance of education is less, so the implementation of the function of the formation of local parliament of Pekalongan City has not been optimal.

The steps that need to be taken to optimize the function of the formation of perda DPRD Pekalongan City is a high commitment to the work, the communication in all lines, professional continuous bintek, and the existence of strict sanctions from the political party bearer.

Keywords: Optimization, DPRD, Formation of Local Regulation.